

Dampak Investasi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak terhadap Pekerja Migran Indonesia

Fariastuti Djafar*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Makalah ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama yaitu membandingkan konsep pembangunan di daerah perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia-Sarawak, Malaysia. Tujuan kedua yaitu menginvestigasi penyebab dari tidak digunakannya fasilitas perumahan dan balai latihan kerja di Entikong oleh pekerja Indonesia di Sarawak. Data yang digunakan dalam makalah ini adalah data primer dan data sekunder yang diterbitkan oleh instansi terkait. Data primer dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci pada 2014, baik di Kalimantan Barat maupun di Sarawak. Hasil penelitian membuktikan bahwa investasi di Entikong hanya merupakan pemborosan karena lebih berdasarkan pada asumsi dengan data dan pemahaman yang terbatas terhadap pekerja migran Indonesia di Sarawak.

JEL: J10

Kata kunci: Pekerja Migran, Perbatasan, Sarawak, Kalimantan Barat

1. PENDAHULUAN

Isu daerah perbatasan lebih populer di Kalimantan Barat (Indonesia) daripada di Sarawak (Malaysia). Penduduk di Sarawak yang tidak tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan Indonesia, mengetahui bahwa Sarawak secara geografis dekat dengan Indonesia. Namun, mereka tidak mengetahui secara pasti bahwa Sarawak memiliki perbatasan darat dengan Kalimantan Barat. Pada 2014, hanya 3 dari 50 mahasiswa di Sarawak yang pernah mendengar bahwa daerah ini berbagi daratan dengan Indonesia. Sebaliknya, umumnya mahasiswa di Pontianak, ibukota Kalimantan Barat, mengetahui bahwa provinsi ini berbatasan dengan Sarawak dan 5 dari 50 mahasiswa pernah pergi ke Sarawak untuk berlibur dengan menggunakan bus atau mobil pribadi (hasil tanya jawab penulis di kelas ketika memberikan kuliah di Sarawak dan Kalimantan Barat).

Isu daerah perbatasan tidak hanya populer di kalangan warga seperti mahasiswa, tetapi juga di kalangan pejabat pemerintah. Isu ini sering digaungkan oleh pejabat daerah sebagai upaya menarik pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan daerah perbatasan. Setiap kabupaten perbatasan termasuk provinsi, masing-masing memiliki konsep pembangunan daerah perbatasan yang terkesan canggih walau mereka juga selalu menyatakan bahwa otoritas pembangunan di perbatasan berada pada pemerintah pusat. Otoritas penuh pemerintah pusat sebenarnya hanya pada area ICQS (Immigration, Customs, Quarantine and Security) yang merupakan wilayah pertama setelah zona netral antara negara yang berbatasan. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, istilah ICQS dikenal dengan nama Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sebelumnya menggunakan nama Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Sumber dana pembangunan di luar wilayah ICQS dapat

*Email: fariastuti@ekonomi.untan.ac.id

bersumber dari pemerintah pusat, namun usulan pembangunan tetap dari pemerintah daerah, yaitu provinsi.

Makalah ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah membandingkan konsep pembangunan di daerah perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia-Sarawak, Malaysia. Tujuan kedua adalah menginvestigasi penyebab dari tidak digunakannya fasilitas perumahan dan balai pelatihan oleh pekerja migran di Sarawak. Penelitian dilakukan di luar wilayah ICQS Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau yang merupakan lokasi tempat dibangunnya fasilitas tersebut, dan Tebedu serta Kuching di Sarawak. Makalah ini terutama menggunakan data primer yang diperoleh dengan metode observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci baik pekerja migran Indonesia maupun pejabat terkait, pada 2014. Observasi ke Entikong juga dilakukan pada 2020 dalam rangka mendapatkan fakta terkini yang diperlukan.

2. BORDER DEVELOPMENT CENTRE/BDC DAN SARAWAK CORRIDOR RENEWABLE ENERGY/SCORE

BDC adalah konsep pemerintah Kalimantan Barat untuk pembangunan di perbatasan (<http://tataruang.atr-bpn.go.id>). BDC akan dikembangkan pada setiap kecamatan yang berbatasan dengan Sarawak. Setiap BDC memiliki tujuh fungsi yaitu kawasan industri, zona perdagangan bebas (pasar tradisional, pasar regional dan titik pemasaran), tempat pemeriksaan lintas batas, pelabuhan darat, balai latihan bagi pekerja yang akan berangkat ke Sarawak, perumahan untuk pekerja yang bekerja di Sarawak dan pariwisata. Kalimantan Barat memiliki tiga perbatasan darat resmi dengan Sarawak yang terletak di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, dan Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu.

SCORE (State Planning Unit Chief Minister's Department, 2016) adalah konsep pembangunan Sarawak. Sarawak memiliki lima pusat pertumbuhan yang terletak di Tanjong Manis, Mukah, Samalaju, Baram dan Tunoh. Setiap pusat pertumbuhan memiliki peran yang berbeda namun saling terintegrasi. Mukah adalah *Smart City* sebagai pusat pelayanan; Tanjong Manis adalah pelabuhan regional dan pusat industri halal; Samalaju adalah pusat industri berat; Baram dan Tunoh adalah pusat wisata dan sumber daya industri.

Lokasi pusat pertumbuhan Sarawak lebih dekat ke Brunei dibanding Kalimantan Barat. Sarawak sebagai daerah perbatasan sama sekali tidak ditulis dalam dokumen SCORE sehingga terkesan tidak ada peran strategis daerah ini sebagai daerah perbatasan. Sebaliknya, BDC sangat menggantungkan diri pada Sarawak sebagai pasar produk dan pasar pekerja Indonesia yang berketerampilan rendah. BDC bahkan terkesan memposisikan kecamatan perbatasan sebagai wilayah khusus yang menjadi bagian dari Sarawak daripada Kalimantan Barat sehingga apa yang direncanakan dianggap sesuai dengan situasi di Sarawak.

BDC juga tidak mengaitkan perencanaan di kecamatan perbatasan dengan daerah lainnya di Kalimantan Barat walau sebagian dari pelintas batas berasal dari luar kecamatan perbatasan yang harus melalui beberapa kabupaten untuk sampai di PLBN Entikong, sebelum masuk ke ICQS Sarawak. BDC dianggap sebagai pendekatan baru dalam pembangunan daerah perbatasan yang sebelumnya lebih menekankan pada pendekatan keamanan daripada kesejahteraan. Fakta menunjukkan bahwa keamanan di sekitar PLBN masih sangat rawan, terutama bagi pelintas batas yang lugu dan tidak memiliki informasi yang cukup.

3. BORDER DEVELOPMENT CENTRE DAN SITUASI DI SARAWAK

Dari beberapa rencana dalam BDC, telah dibangun balai pelatihan untuk calon pekerja Indonesia di Sarawak dan perumahan untuk pekerja Indonesia di Sarawak yang diresmikan pada 2005. Sampai dengan 2020, fasilitas tersebut tidak pernah digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Hal tersebut membuktikan dugaan yang telah dikemukakan sejak sebelum dibangunnya fasilitas ini namun tidak ditanggapi oleh pemerintah yang tetap terus mewujudkan rencananya. Situasi ini cukup ironis karena pemerintah daerah selalu mengeluh tentang terbatasnya anggaran pembangunan terutama di daerah perbatasan.

Entikong berbatasan langsung dengan Tebedu, Serian, Sarawak. Setiap hari, ICQS di Entikong dan Tebedu buka pada pukul 5 pagi dan tutup pukul 5 petang waktu Indonesia atau pukul 6 pagi dan pukul 6 petang waktu Malaysia. Kendaraan yang dapat melalui ICQS Entikong dan Tebedu hanyalah kendaraan roda empat, baik kendaraan publik yang mendapat izin operasi dari kedua negara maupun kendaraan pribadi. Jarak antara ICQS Tebedu dengan Serian, pusat kota terdekat di Sarawak, sekitar 30 kilometer (km.) sedangkan jarak dari Serian ke Kuching (ibukota Sarawak) sekitar 60 km.

3.1. Perumahan untuk pekerja migran Indonesia di Sarawak

Perumahan untuk pekerja migran Indonesia di Sarawak terdiri dari 96 unit. Perumahan ini dibangun dengan maksud warga Indonesia yang bekerja di Sarawak tinggalnya di Entikong sehingga mereka lebih banyak mengeluarkan uang di Entikong daripada di Sarawak. Asumsi tersebut sangat jauh dari realita. Menjadi komuter sangatlah sulit karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, pekerja Indonesia di luar negeri berupaya untuk hidup hemat agar dapat mengirim lebih banyak uang kepada keluarga di Indonesia. Bahkan, mereka yang memiliki rumah dan keluarga di Entikong dan bekerja di Tebedu, tidak pulang setiap hari. Mereka pulang beberapa kali dalam setahun jika ada libur umum beberapa hari di Malaysia seperti saat Hari Raya Idul Fitri, Natal atau *Gawai*. Sebagian pekerja dari Entikong bahkan membawa anggota keluarganya untuk tinggal di Tebedu.



Sumber: Koleksi penulis

Gambar 1. Gerbang perumahan untuk pekerja Indonesia di Sarawak, Entikong

Perusahaan umumnya menyediakan perumahan/asrama gratis untuk pekerja. Ada juga pekerja yang menyewa rumah atau kamar di dekat lokasi kerja. Pekerja bangunan bahkan membangun pondok di lokasi yang sama dengan bangunan yang sedang dikerjakan sementara pembantu rumah tangga tinggal bersama majikan. Jam kerja normal di Malaysia adalah

9 jam per hari, tidak termasuk lembur. Pekerja sering diwajibkan lembur untuk mencapai target produksi perusahaan. Jam kerja juga bervariasi, ada yang dimulai pukul 8 pagi dan selesai pukul 5 petang jika tanpa lembur, dan ada juga yang bekerja mulai pukul 1 subuh dan selesai pukul 10 pagi. Dengan tuntutan kerja yang tinggi dan perlunya waktu istirahat yang cukup, pekerja Indonesia lebih memilih untuk beristirahat di Sarawak daripada pulang ke Entikong.



Sumber: Koleksi penulis

Gambar 2. Perumahan untuk pekerja Indonesia di Sarawak, Entikong



Sumber: Koleksi penulis

Gambar 3. Pos jaga perumahan untuk pekerja Indonesia di Sarawak, Entikong

Pekerja Indonesia terkonsentrasi di Bintulu, Miri, Kuching dan Sibu (Gambar 4) yang jauh dari ICQS Tebedu-Entikong. Walau Gambar 4 menggambarkan data pemilih tetap di Sarawak pada Pemilu 2013, data tersebut umumnya mencakup pekerja migran Indonesia. Bintulu, Miri dan Sibu yang merupakan pusat perkebunan kelapa sawit di Sarawak, yang lokasinya lebih dekat ke Brunei daripada Entikong. Misalnya, dari Bintulu ke Tebedu memerlukan 11 jam perjalanan dengan bus dan harga tiket sekitar MYR 81 (ringgit Malaysia). Salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar yang berpusat di Miri, mempekerjakan sekitar 8.000 pekerja yang sekitar 80% merupakan warga Indonesia (detik finance, 2016). Selain di perkebunan, warga Indonesia di Sarawak, bekerja di sektor bangunan, manufaktur, dan jasa, antara lain sebagai pembantu rumah tangga.



Sumber: Konsulat Jenderal Republik Indonesia, 2013

Gambar 4 . Distribusi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri menurut Divisi, Sarawak

Sebagian pekerja Indonesia yang melalui PLBN Entikong, berasal dari luar Kalimantan Barat. Misalnya dari 8.895 pekerja pada 2012 dan 3.974 pekerja pada 2018, 34% dan 62% berasal dari luar Kalimantan Barat seperti dari Jawa, Sulawesi atau Nusa Tenggara (Badan Pusat Statistik, 2019). Mereka bekerja di Sarawak sehingga lebih dekat dan murah berangkat ke lokasi kerja melalui PLBN Entikong. Mereka yang berasal dari Kalimantan Barat, sebagian besar berasal dari Kabupaten Sambas. Dari seluruh pekerja yang berangkat melalui prosedur resmi selama 2011-2018 (26.781 orang), 55% berasal dari Kabupaten Sambas dan hanya sekitar 1,8% dari Kabupaten Sanggau (BNP2TKI, 2019). Pekerja yang tidak memiliki rumah dan keluarga inti di Entikong, tidak memiliki alasan pribadi maupun ekonomis untuk tinggal dan menyewa rumah di Entikong, apalagi pekerja yang berasal dari Entikong.

3.2. Unit Latihan Kerja Industri Entikong

Unit latihan kerja ini direncanakan menjadi tempat pelatihan bagi calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri, khususnya Sarawak. Bangunan ini berada pada areal yang cukup luas. Terdapat beberapa fasilitas di sini seperti kantor, rumah karyawan, aula, tempat pelatihan dan penginapan selama latihan. Lokasi unit latihan kerja ini sangat tidak strategis bagi calon pekerja migran yang sebagian besar berasal dari luar Entikong. Mereka hanya melintas karena PLBN Entikong merupakan satu-satunya pintu masuk resmi ke Sarawak sebelum PLBN Aruk Sajingan Besar diresmikan pada 2011 dan PLBN Badau diresmikan pada 2012. Sebagian dari pekerja migran tersebut sudah mengikuti pelatihan di lokasi masing-masing agen. Sebagian lagi tidak merasa perlu mengikuti pelatihan di Indonesia karena mereka akan dilatih sambil bekerja di tempat kerjanya masing-masing pada awal penempatan di Sarawak. Pekerja migran yang lain merasa sudah cukup terampil karena telah memiliki pengalaman kerja di Malaysia atau di Indonesia.



Sumber: Koleksi penulis

Gambar 5. Kantor dan rumah karyawan Unit Latihan Kerja Industri, Entikong



Sumber: Koleksi penulis

Gambar 6. Ruang pelatihan Unit Latihan Kerja Industri, Entikong



Sumber: Koleksi penulis

Gambar 7. Balai Pertemuan Unit Latihan Kerja Industri, Entikong

4. SIMPULAN

Kasus fasilitas perumahan dan unit latihan kerja di Entikong yang tidak dimanfaatkan oleh pekerja Indonesia di Sarawak, menunjukkan bahwa pembangunan di daerah perbatasan tidak selalu memberi dampak seperti yang diharapkan. Pemerintah pusat maupun provinsi tampaknya lebih mengedepankan jalan pintas untuk terlihat peduli terhadap daerah perbatasan sehingga lebih mengutamakan mewujudkan keinginan walau tidak sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang terlihat canggih untuk daerah perbatasan yang cukup mudah ditelusuri secara daring, lebih didasarkan pada asumsi yang sangat lemah. Padahal, tak kurang data yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan yang menyeluruh dan mendasar walau pencapaiannya perlu bertahap. Kegagalan investasi di daerah perbatasan yang tidak berdampak terhadap pekerja migran seharusnya menjadi pembelajaran agar tidak kembali terjadi di kemudian hari. Keluhan terhadap dana investasi yang terbatas tak selayaknya terus digaungkan jika pada kenyataannya pemerintah terus melakukan pemborosan yang seharusnya tidak perlu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). Kalimantan Barat Dalam Angka 2019. Pontianak: Badan Pusat Statistik
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI (2019). Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2019. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi.
- Detik Finance. (2016). Mayoritas Pekerja Kebun Sawit di Sarawak adalah WNI. <https://finance.detik.com/industri/d-3150796/mayoritas-pekerja-kebun-sawit-di-sarawak-adalah-WNI>
- http://tataruang.atr-pn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf . Kawasan Perbatasan Entikong, Perjalanan Panjang Menuju Beranda Depan.
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia. (2013). Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), Sarawak.
- State Planning Unit Chief Minister's Department. (2016). Sarawak Corridor of Renewable Energy Powering the Future.